

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis , Teori ini menggambarkan dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Teori Stewardship adalah alternatif teori keagenan dan menawarkan prediksi yang berlawanan mengenai penataan papan efektif. Teori stewardship dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian suatu organisasi (Jefri, 2018)

Teori Stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor public seperti organisasi pemerintahan dan non profit yang sejak awal perkembangannya , akuntansi organisasi sektor public telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dan *principals*. (Oktavianus Pasaloran, 2001)

Teori ini menjadi landasan dari penelitian ini yang dapat menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sebagai Principal yang memberikan kepercayaan penuh dalam

menjalankan tugas dan mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD sebagai Steward tanpa mengutamakan kepentingan pribadi tetapi berfokus pada kepentingan Bersama

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan kepada pihak-pihak pengguna anggaran untuk termotivasi agar mereka dapat mencapai target atau sasaran utama organisasi. Steward (pejabat struktural) yang dipercaya untuk mengelola anggaran tersebut agar termotivasi dan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau sasaran organisasi, dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat sehingga apa yang menjadi tujuan, visi, misi organisasi dapat tercapai dengan maksimal.

2. Teori Kontinjensi

Kazt dan Rosenzweig (1973) yang menyatakan bahwa tidak ada cara terbaik dalam mencapai kesesuaian antara faktor organisasi dan lingkungan untuk memperoleh prestasi yang baik bagi suatu organisasi.

Menurut Raybun dan Thomas (1991), teori kontingensi menyatakan pemilihan sistem akuntansi oleh pihak manajemen adalah tergantung pada perbedaan desakan lingkungan perusahaan. Teori ini penting sebagai media untuk menerangkan perbedaan dalam struktur organisasi dan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi.

Teori Kotingensi berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri. Menurut (Stoner 1996:47) pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional merupakan suatu pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda

Pendekatan kontingensi merupakan sebuah aplikasi konsep yang menyatakan bahwa tidak ada suatu sistem kontrol terbaik yang dapat diterapkan untuk semua organisasi dan penerapan sistem yang tepat harus memandang adanya keterlibatan variabel kontekstual dimana organisasi tersebut berada. Teori kontingensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk berbagai macam tujuan dan untuk menghadapi persaingan (Otley, 2014). Teori kontingensi dalam akuntansi manajemen menggambarkan suatu model dan kerangka pikir untuk mengidentifikasi sistem pengendalian dalam suatu kondisi yang paling tepat. Pada prinsipnya, para praktisi akuntansi manajemen selalu mencoba menyesuaikan sistem agar lebih dapat berguna dalam setiap keadaan. Seperti upaya untuk mengidentifikasi variabel kontingensi yang paling penting dan menilai dampaknya pada desain sistem pengendalian

3. Serapan Anggaran

Menurut (Ramdhani & Anisa, 2017) Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya Penyerapan anggaran yang rendah bukan merupakan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap harus menaruh perhatian terhadap ini. Apabila hal ini terus terjadi, dapat dipastikan target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai, dan ini berarti ada uang pemerintah daerah yang menganggur yang seharusnya dapat diinvestasikan pada tempat-tempat yang lebih produktif (BPKP, 2011).

Penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD. Menurut (Noviwijaya & Rohman, 2013) penyerapan anggaran SKPD merupakan “proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran”. Secara sederhana, penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai perbandingan anggaran dan pelaksanaannya. Kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan, dengan anggapan bahwa fisik aktual pekerjaan tersebut relatif sama dengan target penyelesaian pekerjaan yang direncanakan (Delia et al., 2021). Secara sederhana, suatu penyerapan anggaran dikatakan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya.

Penyerapan anggaran yang tidak optimal mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Jika alokasi anggaran efisien, sumber pendanaan yang terbatas dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan yang strategis. Sumber pendapatan yang terbatas mengharuskan pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan dan mengalokasikan anggaran yang efektif dan efisien. Menurut (Miliasih, 2012) keterlambatan realisasi anggaran pada satuan kerja antara lain dapat disebabkan oleh:

- a. Kurangnya SDM pengelola keuangan yang berkualitas
- b. Dasar penunjukkan pejabat/staf pengelola anggaran masih bersifat kepercayaan
- c. Dominasi jabatan pengelola anggaran tertentu, yang berpengaruh terhadap strategi dalam pelaksanaan anggaran; Sebagai contoh, satker yang didominasi oleh peran seorang bendahara yang dipercaya oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menyebabkan perencanaan dan realisasi anggaran hanya dapat dilakukan oleh bendahara. Hal ini menyebabkan tidak berjalannya fungsi tenaga pengelola anggaran lainnya, sehingga dalam realisasi anggaran tenaga pengelola anggaran lainnya harus menunggu instruksi dari bendahara
- d. Efek jabatan struktural, penunjukkan sebagai pengelola anggaran bukan karena kapasitas

- e. Tingkat kepedulian PA/KPA satker yang rendah terhadap tanggung jawab pengelolaan anggaran. Kepedulian PA/KPA menentukan pengelolaan anggaran yang tepat guna dan tepat waktu
- f. Kebiasaan tenaga pengelola anggaran menunda pekerjaan dan mengeksekusi kegiatan di akhir tahun anggaran.

Meskipun penyerapan anggaran bukan merupakan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap harus menaruh perhatian terhadap hal ini. Apabila hal ini terus terjadi, dapat dipastikan target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai, dan ini berarti ada uang pemerintah daerah yang menganggur (*idle money*) yang seharusnya dapat diinvestasikan pada tempat-tempat yang lebih produktif (BPK, 2018).

Kondisi penyerapan anggaran yang rendah dan tidak proporsional menurut (Miliasih, 2012) akan berimplikasi pada:

- a. Lambatnya pelaksanaan Kegiatan/program pemerintah dan/atau pelayanan publik;
- b. Penundaan pencairan dana untuk belanja barang/jasa menyebabkan fungsi stimulus fiskal dan multiplier effect dari belanja pemerintah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat tidak optimal pada awal tahun anggaran;

- c. Penumpukan tagihan kepada negara pada akhir tahun anggaran menyebabkan beban yang berat terhadap penyediaan uang/kas pemerintah, sehingga dapat memungkinkan terjadinya cash mismatch.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia berhubungan dengan kemampuan terhadap detail tugas dan tanggung jawab pada tingkat : 1) mempersiapkan deskripsi pekerjaan ; 2) jumlah dan kualifikasi staf ; dan 3) terpenuhinya kebutuhan perekrutan . Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi. Di setiap SKPD harus mempunyai sumber daya yang terlatih dan mampu menangani tugas tugasnya. Staf juga harus dilengkapi dengan uraian tugas yang tepat (Indah et al., 2021)

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. Untuk membentuk aparatur yang sempurna diperlukan upaya peningkatan manajemen pegawai negeri sipil yang diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen pegawai negeri sipil, baik pegawai negeri sipil pusat maupun pegawai negeri sipil daerah. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan akan dapat diciptakan kualitas pegawai negeri sipil yang seragam di seluruh Indonesia (Undang-undang No. 43 Tahun 1999).

Keterampilan individu juga menjadi nilai tambah bagi seseorang. Keterampilan individu seorang PNS mengacu pada tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang pengetahuan yang diberikan dari waktu ke waktu. Hal ini diterima secara luas bahwa staf berpendidikan tinggi dan secara teknis yang berkualitas lebih mudah menerima pembauran dan mampu mentransformasi pengetahuan eksternal yang tersedia (Zarinah et al., 2016). Dengan kata lain, perusahaan dengan karyawan yang berpendidikan tinggi dan terlatih akan memiliki kemampuan merealisasikan tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi.

5. Teknologi Informasi

Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing (Wahana Komputer, 2003),

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang

membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi Informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, smartTV, *smart watch* dan peranti genggam modern (*smartphone*).

Teknologi informasi berkaitan dengan perubahan cara kerja dari yang semula dilakukan secara manual menuju sistem yang terkomputerisasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat-gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. (Wilkinson Dkk, 2000).

6. Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang Sistem pengendalian intern pemerintah bahwa pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan dapat dicapai apabila seluruh pimpinan dan staf- staf di daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian pada keseluruhan kegiatannya mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efektif dan efisien.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya- manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Alasan atau latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Paket Reformasi Keuangan Negara menuju Good Governance atau tata kelola yang baik dan Good Government (Hindriani et al., 2012) Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan birokrasi yang kuat untuk menuju cita-cita yang diharapkan melalui penerapan pengendalian intern yang tercakup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih menitikberatkan pada soft controlnya meliputi etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dan perangkat lunak lainnya

Anggaran yang berkualitas saja belum tentu menjamin keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan apabila suatu rencana mempunyai

kemungkinan kecil untuk berhasil jika tidak dilakukan pengendalian. Dalam hal ini terdapat tiga aspek utama yang dapat mendukung keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam anggaran yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan Mardiasmo (2009)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengidentifikasi unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan pada kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas serta fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah dibawah ini :

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
2. Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
4. Pengendalian fisik atas aset.
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
6. Pemisahan fungsi.
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1.	Monik Zarinah, Jurnal Magister Akuntansi, Volume 5, No.1 Febuari 2016	Variabel Y: Serapan Anggaran Variabel X: Sumber Day Manusia	Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Serapan anggaran pemerintah
2.	Friska Anjelita Coloay, Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 No.1 Tahun 2018	Variabel Y: Serapan Anggaran Variabel X: Sumber Daya Manusia	SDM berpengaruh signifikn terhadap serapan anggaran
3.	Indi Zaenur Anisa, Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, Volume 2 No.1 April 2017	Variabel Y: Serapan Anggaran Variabel X: Sumber Daya Manusia	Kulaitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran
4.	Kadek Mia Ranisa Putri dkk, Jurnal Akuntansi Program S1 Volume 8 No.2 Tahun 2017	Variabel Y: Serapan Anggaran Variabel X: Sumber Daya Manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran
5.	Wiansyah & Mulyani, Jurnal SIKAP Volume 5 No.2 Tahun 2021	Variabel Y: Serapan Anggaran Variabel X: Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian internal berpengaruh pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja daerah.

6.	Kennedy dkk, Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Volume 13 No.2 November 2020	Variabel Y: Serapan Anggaran Variabel X: Sistem Pengendalian Internal	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
8.	Aldina, Jurnal Akuntansi Volume 4 No.1 2016	Variabel Y: Serapan Anggaran Variabel X: Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran
9.	Nurhayati & Juminah, AFEBI Accounting Review Vol.02 No.2, Desember 2017	Variabel Y: Serapan Anggaran Variabel X: Pemanfaatan Teknologi	Pemanfaatan teknologi e-prourement tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
10.	Puji Nurhayati, Accounting Review, 2017	Variabel Y: Serapan Anggaran Variabel X: Pemanfaatan Teknologi	Penggunaan teknologi e-procurement berpengaruh terhadap anggaran penyerapan
11.	Sawidar Dkk, Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan Vol.1(1) :151-160 (2018)	Penggunaan Teknologi E-Procurement	Penggunaan teknologi E-Procurement berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
12	Tofani Dkk, Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol.4 No.2 ,Juni 2020 (165-182)		Pemanfaatan Teknolgi Informasi berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

C. Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara variabel independent dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah serapan anggaran pemerintah daerah, sedangkan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara variabel independent dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah serapan anggaran pemerintah daerah, sedangkan variabel independennya adalah kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengendalian internal.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres Nomor 53 Tahun 2010 (Kuncoro, 2013).

Mardiasmo (2009) menyatakan penyerapan anggaran berpengaruh cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap instansi harus mengatur pengeluaran agar berjalan dengan lancar dan dapat berkontribusi pada keberhasilan realisasi tujuan

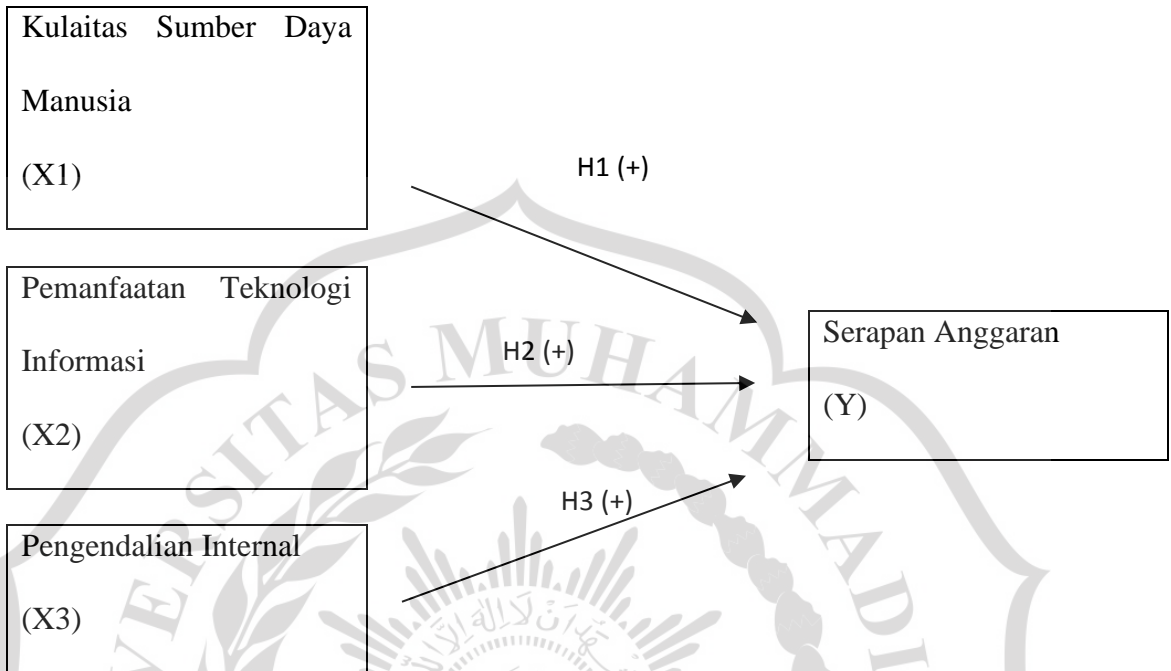
pembangunan nasional. Penyerapan anggaran tidak harus 100%, tetapi setidaknya harus mencakup lebih dari 80% dari anggaran yang ditetapkan.

Gomes (1995) menyebutkan bahwa semua potensi sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Secanggih apapun teknologi dan informasi, tanpa sumber daya manusia akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang bekerja dengan segala kemampuan, keterampilan dan pengetahuannya akan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Pemanfaatan teknologi informasi menurut (JIN, 2003) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan.

Untuk mengoptimalkan tingkat penyerapan anggaran Pemerintah secara efektif dan efisien, penyerapan anggaran bisa didukung dengan adanya pengendalian internal Pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan tentang suatu system yang menyelenggarakan kegiatan pengendalian pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efektif serta efisien dalam pengelolaan keuangan negara dan dana anggaran.

Untuk lebih menyederhanakan model pemikiran tersebut, maka dibuatlah model penelitian seperti terlihat pada gambar :



D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Alam Terhadap Serapan Anggaran

Darma (2014) menyatakan pemerintah daerah harus berperan lebih baik terhadap peningkatan daya serapan anggarannya dengan melakukan peningkatan kualitas perencanaan dan sumber daya manusia. Gomes (1995) menyebutkan bahwa semua potensi sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Secanggih apapun teknologi dan informasi, tanpa sumber daya manusia akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang bekerja dengan segala kemampuan, keterampilan dan pengetahuannya akan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi pemerintah, tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyerapan anggaran dari program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Belum maksimalnya penyerapan penggunaan anggaran APBD oleh beberapa SKPD menunjukkan bahwa SKPD tersebut belum mampu memaksimalkan sumber daya manusianya (Maulana, 2011). (Herriyanto, 2011) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ramdhani & Anisa, 2017) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Putri, dkk (2012) dan Juwita

(2013) juga menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, dikarenakan sistem informasi akuntansi membantu dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dan bebas dari kesalahan saji. Penelitian (Zarinah et al., 2016a) juga menemukan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran SKPD di Kabupaten Aceh Utara.

H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap serapan anggaran

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Serapan Anggaran

Theory of fit menyebutkan bahwa sistem informasi akan mempengaruhi individu kinerja jika ada kecocokan dan korespondensi antara kebutuhan tugas pengguna teknologi informasi dan fungsionalitas sistem informasi. Oleh karena itu, teknologi akan dapat membantu tugas individu dalam menyelesaikan tugas. Pemanfaatan teknologi diasumsikan sebagai dampak kinerja yang dihasilkan dari kesesuaian teknologi dan tugas-tugasnya di mana teknologi telah menyediakan fitur yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan tugas pengguna teknologi.

Goodhue dan Thompson (1995) mengungkapkan bahwa teknologi adalah alat yang digunakan oleh individu dalam menjalankan tugasnya. Teknologi harus memiliki dampak positif pada kinerja individu, teknologi harus kompatibel dengan tugas-tugas yang mendukung itu dan teknologi harus dimanfaatkan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki efek positif pada kinerja individu.

(Medah, 2001) dan (Wahyuni Istiqomah, 2010) juga memberikan bukti empiris bahwa penggunaan teknologi e-procurement berdampak positif terhadap kinerja individu. Quesada et al. (2010) membuktikan dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi pemanfaatan e- teknologi pengadaan, semakin tinggi kinerja pengadaan barang/jasa. (Taufik & Fahlevi, 2016) juga telah membuktikan bahwa e-pengadaan berpengaruh positif terhadap penyerapan belanja modal

H2 : Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Serapan Anggaran

Untuk mengoptimalkan tingkat penyerapan anggaran Pemerintah secara efektif dan efisien, penyerapan anggaran bisa didukung dengan adanya pengendalian internal Pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan tentang suatu system yang menyelenggarakan kegiatan pengendalian pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban secara tertib, terkendali, efektif serta efisien dalam pengelolaan keuangan negara dan dana anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Irma Aldina, 2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. (Kennedy et al., 2020) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dengan dijalankannya SPI yang baik dalam pemerintah sangat bermanfaat untuk mengendalikan semua kegiatan atau program yang di

laksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah, demikian juga sebaliknya jika tidak dijalankan dengan tepat maka dapat terjadi resiko dalam penyelewengan penyerapan dana anggaran yang akan terjadi kedepannya. Jika penerapan SPIP memadai, maka kinerja pemerintah dalam pelaksanaan anggaran daerah akan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPIP tidak berjalan optimal maka fungsi sistem pengendalian itu tidak akan berjalan dengan semestinya sehingga kemungkinan adanya penyelewengan kekuasaan untuk melakukan penyimpangan terhadap anggaran tersebut.

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

